

PENGARUH ALAT BUKTI HASIL TES URIN MELALUI PEMERIKSAAN  
LABORATORIUM FORENSIK TERHADAP PUTUSAN YANG DIJATUHKAN  
HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 159/Pid.B/2010/PN.Yk)

**Anggraeni Yuko Isnawangsri, Endbram Riaditya dan Tuhu Setiawan**  
**FH UNS Surakarta**

**ABSTRACT**

*Legal research entitled The Effect of Evidence Through The Urine Test Results Of Forensic Laboratory Examination Towards Decision Handed Down by Judges in Drugs Abuse Crime (Case Study of The Yogyakarta District Court's Decision No. 159/Pid.B/2010/PN.Yk), aimed to determine the suitability of forensic laboratory urine test results as evidence by the provisions contained in the KUHAP and its influence on the judge consideration in decisions.*

*This legal research is using normative research method with prescriptive and applied characteristic. So in this legal research using case approach. Sources of legal materials in this research is the primary legal materials and secondary legal materials. This legal research is collecting legal material by literature study. Legal materials analysis that are deduced by the method of syllogism, the filing of the major and the minor premise and then draw ratio decidendi conclusions.*

*In this research it can be seen that the urine test results through forensic laboratory examinations be referred to as valid documentary evidence because comply with the characteristics of documentary evidence in accordance with the provisions of Article 184 paragraph (1) letter c in conjunction with Article 187 paragraph b and c KUHAP, although not mentioned implicit in Article 184 of the KUHAP. In its decision, the judges used evidence urine test results through forensic laboratory tests on its consideration in decisions, so the judge set the defendant was legally and convincingly met the second charge, namely Article 127 paragraph (1) letter a of Act No. 35 of 2009 on Narcotics (Drugs Abuse). It can be concluded that the results of urine tests through forensic laboratory examinations influence the decision handed down by the judge in the case. The imposition of criminal sanctions in accordance with Article 183 in conjunction Article 193 paragraph (1) KUHAP.*

*Keywords : evidence, urine, forensic laboratory, drugs, decision*

## PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) Perubahan Keempat, menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) dan bukanlah negara atas dasar kekuasaan (*machtstaat*). Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tanpa terkecuali. Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum dimana hukum memiliki kekuasaan yang tertinggi dalam negara. Bersamaan dengan hal tersebut, Indonesia menganut asas yang penting yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang ketentuannya diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) (Bambang Waluyo, 2008:33). Dalam penanggulangan kejahatan melalui mekanisme penegakan hukum pidana (dalam arti sempit), adalah salah satu harapan bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan yang sesungguhnya. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui mekanisme Hukum Acara Pidana berdasarkan KUHP yang tujuan utamanya adalah mencari kebenaran materiil.

Salah satu tindak pidana yang diatur di luar KUHP adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Maraknya tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana selama ini masyarakat dengar maupun baca dari media massa perlu

mendapatkan perhatian yang serius. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia mulai muncul sejak tahun 1969. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya merupakan suatu kajian yang menjadi masalah dalam lingkup nasional maupun internasional. Pada kenyataannya, kejahatan narkotika telah menjadi suatu kejahatan transnasional yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisasi (*organized crime*).

Angka perkembangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun bertumbuh dengan sangat cepat sekalipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang peredaran narkotika dan prekursor narkotika yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang baru menggantikan undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pengganti undang-undang yang lama itu dirasa perlu karena seiring dengan bertambahnya waktu dirasakan tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi dan perkembangan penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat dan bervariasi motif penyalahgunaan dan pelakunya, dilihat dari cara menanam, memproduksi, menjual, memasok dan mengkonsumsinya serta dari kalangan mana pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut.

Satu hal yang terpenting dalam Hukum Acara Pidana yang menganut asas praduga tak bersalah, maka harus dibuktikan benar

atau tidaknya seorang terdakwa melakukan kejahatan yang didakwakan. Karena pembuktian bersalah atau tidaknya seseorang yang telah didakwa melakukan suatu kejahatan akan berpengaruh terhadap nasib hidup dari orang tersebut. Sehingga tidak dibenarkan jika seseorang dijatuhi pidana hanya berdasarkan pada keyakinan hakim belaka tanpa disertai dengan alat bukti yang kuat. Alat bukti menurut KUHAP tercantum di dalam Pasal 184 ayat (1), yakni: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan menurut Pasal 183 pula telah secara tegas menerangkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memiliki keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah benar dilakukan oleh terdakwa.

Dampak dari perkembangan kejahatan akan berimplikasi langsung pada makin beratnya tugas aparat penegak hukum dalam mengungkapkan suatu kejahatan karena akal para pelaku kejahatan semakin maju dan berkembang. Sehingga dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dituntut untuk mengembangkan teknik pengungkapan tindak pidana untuk mendapatkan atau menguatkan informasi tentang terjadinya tindak pidana melalui pengetahuan agar diperoleh pembuktian yang logis berdasarkan atas penemuan fakta yang ada sehingga dapat membentuk konstruksi yang logis (Andi Hamzah 2002 : 34).

Saat memasuki era globalisasi dan transparansi ini penyidik harus sudah meninggalkan cara-cara penyidikan konvensional dan harus berpindah dengan

cara Scientific Crime Investigation (penyidikan secara ilmiah). Demi terciptanya kepastian hukum dan rasa keadilan sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh kepada hukum. Scientific Crime Investigation yaitu proses penyidikan yang dalam sistem pembuktiannya memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau memanfaatkan fungsi forensik (Identifikasi Forensik, Laboratorium Forensik, Psikologi Forensik, Kedokteran Forensik dan ahli forensik lainnya).

Hakim harus memahami hukum sehingga bila ia tidak mendapat kejelasan ataupun tidak mendapat ketentuan tentang suatu perkara yang dihadapkan kepadanya di dalam hukum tertulis, maka ia dapat menggali dari hukum yang tidak tertulis. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim dan hakim konstitusi menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga diharapkan dapat mengenal, menyelami, dan merasakan perasaan hukum dan keadilan.

Menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, menegaskan bahwa dalam sebuah pembuktian yang sah setidaknya memuat sedikitnya dua alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP disertai dengan keyakinan hakim walaupun dalam teori pembuktian yang dianut di Indonesia adalah teori pembuktian Undang-undang secara negatif yang tidak disebutkan pula jika hakim terikat sepenuhnya hanya pada alat bukti secara mutlak. Sedangkan pada ketentuannya, kekuatan pembuktian dari alat

bukti adalah bebas. Hasil tes urin melalui pemeriksaan laboratorium forensik merupakan jenis alat bukti yang tidak disebutkan dalam Pasal 184 KUHP, namun penilaiannya sama seperti halnya visum et repertum, hal tersebut merupakan hasil pengetahuan ahli atas dasar sumpah jabatan yang dituangkan dalam bentuk surat.

Membutuhkan penelitian mengenai keabsahan hasil tes urin melalui pemeriksaan laboratorium forensik dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah untuk membuktikan dakwaan terhadap terdakwa, dan dapat memberikan pengaruh terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Seperti yang dikutip dari paparan B.M Kapuur, *urine is the preferred sample as it is available in larger volume, contains the metabolite and requires less invasive procedures in its collection* (urin merupakan contoh yang dipilih untuk diteliti karena tersedia dalam jumlah yang banyak, mengandung zat metabolisme dan tidak memerlukan prosedur yang invasif dalam pengambilannya) (B.M Kapuur, 2006 :7).

Seperti halnya di dalam penulisan hukum ini, penulis mengambil salah satu kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang menarik untuk dikaji, yaitu yang dilakukan oleh terdakwa Rudy Hermawan yang berprofesi sebagai juru parkir di kota Yogyakarta yang terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai penyalahguna narkotika golongan I yaitu ganja. Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi setempat saat yang bersangkutan terlihat mencurigakan sedang mengkonsumsi narkotika dan kemudian dilanjutkan penelusuran barang bukti dan tes

urin. Proses pemeriksaan hasil tes urin yang kemudian digunakan sebagai alat bukti guna membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan oleh hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan hukuman dalam putusan Nomor 159/Pid.B/2010/PN.Yk.

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif karena dimaksudkan untuk menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pada kesempatan kali ini, penelitian yang dikaji oleh Penulis bersifat preskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Dari beberapa pendekatan tersebut penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Menggunakan pendekatan kasus yang hendak diteliti adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum hakim untuk sampai pada putusan yaitu mengenai adanya kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja, dengan alat bukti hasil tes urin sampai pertimbangan hakim memutuskan perkara. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan jurnal penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Penelitian**

#### **a. Kasus Posisi**

Terdakwa Rudy Hermawan, pada tanggal 25 Desember 2009 sekitar jam 17.00 WIB di Jl. Solo, Yogyakarta telah membeli ganja seharga Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah ) dari Black. Terdakwa mengenal ganja sejak tahun 2009 dengan cara membeli. Terdakwa membeli ganja seharga Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah ) mendapatkan 6 ( enam ) plastik klip ganja. Terdakwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB mengambil sebagian ganja tersebut terdakwa linting dengan menggunakan kertas paper yang salah satu ujungnya terdakwa sulut dengan korek api sedangkan ujung lainnya terdakwa hisap seperti menghisap rokok dan habis 1 ( satu ) linting

Pada hari Senin tanggal 4 Januari 2010 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengambil sebagian ganja yang berada di dalam kandang burung merpati di samping rumah Terdakwa dibuat lintingan rokok ganja sebanyak 1 (satu) linting, kemudian terdakwa pergi ke tepi sungai didekat rumah terdakwa lalu lintingan rokok ganja tersebut salah satu ujungnya disulut dengan korek api dan ujung lainnya terdakwa hisap seperti menghisap rokok berkali-kali hingga 1 (satu) linting.

Saksi Agus Dwi Harsono, S.H. pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2010 sekitar pukul 01.00 WIB didepan Masjid Syuhada Kotabaru Yogyakarta, telah mencurigai terdakwa menyalahgunakan narkotika. Saksi bersama satu team Satnarkoba diantaranya ada saksi Tri Widiatmoko, dan saksi Amri Arvianto kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Ketika saksi Agus Dwi Harsono, saksi Tri Widiatmoko, dan saksi Amri Arvianto melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak diketemukan barang bukti namun ketika dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui menyimpan ganja di rumah terdakwa. Kemudian ketiga saksi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa sekitar pukul 05.00 WIB di Jogoyudan JT. 3/905, Rt.46, Rw.12, Kel. Gowongan, Jetis, Yogyakarta.

Pada waktu melakukan penggeledahan di rumah terdakwa disaksikan oleh saksi Indarwanto selaku ketua RT setempat dan saksi telah menemukan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi ganja. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi ganja tersebut yang Terdakwa simpan didalam kandang burung merpati disamping rumah terdakwa dan barang tersebut diakui milik terdakwa. Barang berupa ganja tersebut sebagian sudah dipakai oleh Terdakwa. kemudian saksi dari pihak Satnarkoba membawa Terdakwa untuk tes urin dan hasilnya positif mengandung ganja. Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang dalam memakai ganja tersebut.

Barang bukti berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG SEMARANG Nomor LAB: 49/KNF/I/2010 tanggal 12 Januari 2010 menyebutkan Nomor BB-0073/2010 berupa 5 ( lima ) bungkus plastik berisi daun batang dan biji yang diduga ganja berat brutto 15,539 gram setelah

dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan daun batang dan biji tersebut adalah ganja, sisa barang bukti berat netto 15,411 gram. Beserta 1 (satu) unit Hand Phone Merk GSTAR Type 310. Alat bukti berupa : Berita Acara Pemeriksaan Urin dari BIDDOKKES POLDA DIY Nomor Pol: R/15/I/2010/Biddokkes tanggal 7 Januari 2010 menyebutkan urin atas nama RUDY HERMAWAN Cannabinoids/Ganja ( + ) positif.

**b. Identitas Terdakwa**

Nama lengkap : Rudy Hermawan  
Tempat lahir : Yogyakarta  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/25 Mei 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jogoyudan JT.3/905, Rt.46, Rw.12, Kelurahan Gowongan, Jetis, Yogyakarta  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Juru parker

**c. Dakwaan Penuntut Umum**

Berdasarkan uraian di atas terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika Golongan I berupa ganja bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang. Bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya tertanggal: 1 Maret 2010 No. Reg.Perk.: PDM. 48/ YOGYA/02/2009 terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**a. Dakwaan kesatu**

Perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**b. Dakwaan kedua**

Perbuatan terdakwa RUDY HERMAWAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**d. Alat Bukti Surat**

Bahwa dipersidangan telah dibacakan serta dijelaskan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG SEMARANG Nomor Lab. : 49/KNF/I/2010 tertanggal 12 Januari 2010 atas nama Rudy Hermawan, dengan kesimpulan contoh yang diuji, daun, batang dan biji adalah Ganja, termasuk Narkotika Golongan I (satu).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin dari BIDDOKKES POLDA DIY Nomor Pol : R/15/I/2010/Biddokkes tanggal 7 Januari 2010 menyebutkan urin atas nama RUDY HERMAWAN Cannabinoids/Ganja ( + ) positif.

**e. Poin Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta**

Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yaitu :

- 1) Menyatakan Terdakwa Rudy Hermawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri “.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudy Hermawan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- 3) Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5) Memerintahkan barang bukti berupa :
  - a) 5 (lima) bungkus plastik klip berisi ganja bobot seluruhnya 15,539 gram.
  - b) 1 ( satu ) Unit Hand Phone GSTAR Type 310.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 6) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

## **2. Pembahasan**

### **a. Kesesuaian Alat Bukti Hasil Tes Urin Melalui Pemeriksaan Laboratorium Forensik Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Ketentuan KUHAP**

Surat merupakan salah satu alat komunikasi yang dibuat secara

tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan informasi dari seseorang atau lembaga atau instansi tertentu yang ditujukan kepada dibakukan. Definisi mengenai alat bukti surat tidak diatur secara jelas dalam KUHAP. Tetapi ada beberapa ahli hukum yang mencoba memberikan definisi, diantaranya J.M. Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah memberikan pengertian tentang surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dibaca, dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan atau meskipun memiliki tanda bacaan akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, maka tidak termasuk alat bukti tertulis atau surat (Andi Hamzah, 2009 : 271). .

Dalam kajian ini, alat bukti yang diteliti dalam Putusan Nomor 159/Pid.B/2010/PN.Yk adalah hasil pemeriksaan urin yang dibuat oleh BIDDOKKES POLDA DIY Nomor Pol: R/15/I/2010/ Biddokkes tanggal 7 Januari 2010 yang digunakan sebagai alat bukti. Dalam kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium forensik tersebut menyatakan bahwa menyebutkan urin atas nama Rudy Hermawan terkandung Cannabinoids/ Ganja (+) positif. Bahwa dalam Putusan Nomor

159/Pid.B/2010/PN.Yk tidak menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik tersebut dibacakan dalam persidangan akan tetapi hanya dihadirkan dalam persidangan yang memperkuat keadaan terdakwa sebagai penyalahguna narkotika.

Pada dasarnya alat bukti yang dihasilkan dari tes urin melalui pemeriksaan laboratorium forensik, dapat dikategorikan menjadi alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat. Alasan hasil tes urin dapat dimasukkan dalam kategori alat bukti keterangan ahli adalah karena dalam melakukan pemeriksaan laboratorium tersebut tentu menggunakan jasa dari seorang ahli dalam bidang forensik, yang pada saat penyidikan kasus yang menimpa Terdakwa Rudy Hermawan, sedang bertugas di BIDDOKKES POLDA DIY. Seperti penjelasan yang tercantum pada KUHAP Pasal 1 angka 28, sebagai berikut :

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”

Berkenaan dengan penjelasan pasal tersebut, jelas bahwa keterangan hasil tes urin diberikan oleh seseorang memiliki keahlian

khusus, yang bertugas di BIDDOKKES POLDA DIY, yakni mengenai bidang forensik, untuk membuat terang kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan terdakwa Rudy Hermawan guna kepentingan pemeriksaan. Untuk itu berarti hasil tes urin dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada penjelasan Pasal 1 angka 28 KUHAP. Namun pada pengaturan selanjutnya dalam KUHAP Pasal 186 dengan bunyi sebagai berikut :

“Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang Pengadilan”

Keterangan yang diperoleh pada hasil tes urin dengan terdakwa Rudy Hermawan tersebut memang diberikan oleh seorang ahli, namun dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 159/Pid.B/2010/PN.Yk tersebut, tidak disebutkan bahwa ahli yang bersangkutan ikut hadir dalam sidang untuk menyatakan keterangannya. Sehingga dalam hal ini, tidak semua unsur dari Pasal 186 tersebut dapat terpenuhi.

Selanjutnya alasan hasil tes urin melalui pemeriksaan laboratorium forensik dapat dimasukkan dalam kategori alat bukti surat adalah bahwa hasil tes urin tersebut tentunya dituliskan di dalam sebuah akta atau dokumen



hitam di atas putih, sebagai bukti fisik yang nantinya dapat diajukan dalam persidangan. Lebih jelasnya pada pengaturan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP dengan penjelasan pada Pasal 187 KUHAP, terutama pada huruf b dan c.

Laboratorium Forensik merupakan sebuah tempat yang digunakan untuk membuktikan dari sebuah dokumen ataupun keadaan yang digunakan sebagai alat bukti dalam sebuah kasus. Dari ketentuan Pasal 187 huruf b KUHAP menyebutkan bahwa :  
“Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termaksud dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan”

Keberadaan Laboratorium Forensik merupakan tempat yang pelaksanaan fungsinya diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berkaitan erat dengan peristiwa yang sedang diperiksa yaitu dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP dan Laboratoris Barang Bukti dibawah Kabareskrim Polri.

Pada huruf c, dinyatakan bahwa hasil tes urin tersebut diperoleh dari seorang ahli yakni ahli dari BIDDOKKES POLDA DIY yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya dalam hal forensik terutama tes urin mengenai pengecekan kandungan urin terdakwa, yang diminta secara resmi dari padanya oleh saksi Agus Dwi Harsono sebagai Penyidik Polri yang sedang menangani kasus tersebut. Bahwa hasil tes urin tersebut dibuat atas sumpah jabatan, yakni sumpah jabatan pejabat BIDDOKKES. Sehingga, hasil pemeriksaan laboratorium forensik dapat disebut sebagai surat yang sah memenuhi ketentuan karakteristik alat bukti surat menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP meskipun tidak disebutkan secara implisit bahwa hasil pemeriksaan laboratorium forensik sebagai jenis alat bukti dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP. Namun sudah memenuhi pengertian alat bukti surat sesuai dengan rumusan Pasal 187 huruf b dan c KUHAP.

**b. Pengaruh Alat Bukti Hasil Tes Urin Melalui Pemeriksaan Laboratorium Forensik Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan**

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana berdasarkan Pasal 183 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Adapun 2 hal yang penting yang terkandung dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yakni:

- a. Sekurang-kurangnya ada 2 (dua) alat bukti yang sah/minimum pembuktian;
- b. Adanya keyakinan hakim. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan.

Menurut C. Djisman Samosir mengenai alat-alat bukti dan pembuktian yaitu dalam setiap pemeriksaan, apakah itu pemeriksaan dengan acara biasa, acara singkat, maupun acara cepat, setiap alat bukti itu diperlukan guna membantu hakim untuk pengambilan keputusannya. Alat-alat bukti ini adalah sangat perlu, oleh karena hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak

pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan perbuatan itu. Dengan demikian alat bukti itu adalah sangat penting di dalam usaha penemuan kebenaran atau dalam usaha menemukan siapakah yang melakukan perbuatan tersebut (C. Djisman Samosir, 1985 : 79).

Penjelasan secara singkat mengenai teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim adalah hakim dapat memutuskan seseorang bersalah sesuai dengan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang dilandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu, jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Putusan Nomor 159/Pid.B/2010/PN.Yk, majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut menyatakan bahwa selain menghadirkan 4 (empat) saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa berita acara hasil tes urin dari BIDDOKKES POLDA DIY Nomor Pol : R/15/I/2010/Biddokkes tanggal 7 Januari 2010, 5( lima ) bungkus plastik klip berisi ganja bobot seluruhnya 15,539 gram dan 1 ( satu ) Unit Hand Phone GSTAR type 310.

Berdasarkan pemaparan di atas maka hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Putusan

Nomor 159/Pid.B/2010/PN.Yk  
menyatakan bahwa:

1. “Menyatakan Terdakwa Rudy Hermawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudy Hermawan dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun”

Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan ini diperoleh dari keterangan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain serta alat bukti surat hasil tes urin dari BIDDOKKES POLDA DIY Nomor Pol : R/15/I/2010/ Biddokkes tanggal 7 Januari 2010, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG SEMARANG Nomor LAB : 49/KNF/I/2010 tanggal 12 Januari 2010 menyebutkan : Nomor BB-0073/2010 berupa 5 ( lima ) bungkus plastik berisi daun batang dan biji yang diduga ganja berat brutto 15,539 gram setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan daun batang dan biji tersebut adalah ganja, sisa barang bukti berat netto 15,411 gram yang bersesuaian pula dengan keterangan para saksi, maka

majelis telah mendapat bukti yang sah dan merupakan sumber keyakinan hakim dalam memberikan putusan, bahwa terdakwa terbukti bersalah dan hakim menjatuhkan putusan pidana bagi terdakwa atas perbuatannya itu.

Sebelum menjatuhkan putusan maka hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek, baik aspek yuridis maupun non yuridis. Aspek yuridis berdasarkan atas penilaian hasil pembuktian pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum, sedang aspek non yuridis adalah hal-hal yang berkaitan erat dengan kondisi sosial, ekonomis, kepribadian terdakwa yang dapat diuraikan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Pengertian pertimbangan hakim sendiri adalah pendapat mengenai baik dan buruk dalam menjatuhkan putusan. Penjatuhan putusan oleh hakim di pengadilan tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti di dalam pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Putusan adalah hasil kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan.

Ada juga yang mengartikan putusan atau vonis sebagai vonis tetap (definitif), mengenai kata putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan (Leden Marpaung, 2010 : 36).

Isi Putusan Nomor 159/Pid.B/2010/PN.Yk merupakan bentuk putusan pemidanaan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Pada umumnya, pada kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika, terdakwa yang berkedudukan sebagai penyalahguna dan bukan pengedar, dapat memperoleh putusan berupa pidana penjara dan/atau wajib rehabilitasi oleh hakim pemeriksa perkara. Namun pada Putusan Nomor 159/Pid.B/2010/PN.Yk, dengan berbagai pertimbangan, majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Rudy Hermawan. Sebagaimana dikutip dari jurnal Calvin Fay, *considerable evidence exists to show that drug abuse contributes to the frequency and intensity of many types of*

*crime, from white-collar offenses and political corruption to property offenses and violence. Similar evidence exists to show that safety in the workplace and the profitability of businesses are directly affected by substance abuse* (Banyak bukti yang ada menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba berkontribusi terhadap frekuensi dan intensitas banyak jenis kejahatan, dari pelanggaran kerah putih dan korupsi politik untuk pelanggaran properti dan kekerasan. Bukti yang sama ada untuk menunjukkan bahwa keselamatan di tempat kerja dan profitabilitas dari bisnis secara langsung dipengaruhi oleh penyalahgunaan zat) (Calvin Fay, 2010 :1).

Berdasarkan sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif yang dianut oleh KUHAP serta berdasarkan alat bukti yang sah, maka hakim memberikan keputusan dalam perkara ini bagi terdakwa Rudy Hermawan dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan

berlandaskan pada ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Bahwa hasil tes urin melalui pemeriksaan laboratorium forensik yang berupa Berita Acara yang dibuat oleh BIDDOKKES POLDA DIY Nomor Pol: R/15/I/2010/Biddokkes tanggal 7 Januari 2010 telah memenuhi ketentuan karakteristik alat bukti surat, berdasarkan pada Pasal 184 ayat (1) huruf c juncto Pasal 187 huruf b dan c KUHAP. Ketentuan karakteristik alat bukti surat menurut pasal tersebut yaitu surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termaksud dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan dan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, yang keduanya dibuat di atas sumpah jabatan.

Hasil tes urin melalui pemeriksaan Laboratorium forensik memiliki pengaruh yang besar terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dinilai sebagai salah satu alat bukti surat yang sah sesuai Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terlihat dalam hal-hal hakim menetapkan jika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi dakwaan kedua, yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu unsur setiap orang, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum telah dapat dibuktikan di persidangan.

### **Saran**

- a. Kepada lembaga legislatif, berkenaan dengan semakin berkembangnya teknologi, diharapkan peraturan perundang-undangan yang ada dapat disesuaikan dengan keadaan terkini, dalam hal ini adalah pencantuman jenis alat bukti dalam hukum acara pidana yang lebih lengkap dan implisit. Seharusnya dalam KUHAP diadakan revisi, guna mencegah kesimpangsiuran dalam penegakan hukum, khususnya pada sesi pembuktian.
- b. Sebaiknya hakim yang pernah memeriksa perkara dengan pokok masalah yang sama, membuat suatu yurisprudensi mengenai peranan alat bukti hasil tes urin dalam pembuktian Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus jelas, terutama mengenai kekuatan pembuktian serta keterikatan hakim terhadap alat bukti tersebut, sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruhnya terhadap pertimbangan hakim. Jika masyarakat mengetahui pengaruhnya, maka diharapkan akan timbul *awareness* atau kesadaran dalam diri untuk menghindari penggunaan narkotika.
- c. Kepada *stakeholder* atau pemangku kepentingan, berkenaan dengan tidak

efektifnya tindakan hukum yang beranggapan bahwa dengan diputus pidana akan menjadi lebih baik dan jera, karena dengan dipidana tidak memberi jaminan bahwa Negara Indonesia ini bebas dari narkoba, maka dari itu dibutuhkan tindakan diluar jalur hukum (*non penal*).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adam Chazawi. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Bambang Poernomo. 1986. *Azas-azas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Ghalia Indonesia.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*. Jakarta : Djambatan
- Djoko Prakoso. 1988. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta : Liberty.
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori Hukum Pembuktian*. Jakarta : Erlangga.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung : Mandar Maju.

Leden Marpaung. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika.

Moeljatno. 2000. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.

Moh. Taufik Makaro dkk. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta : Ghalia.

P.A.F Lamintang. 1987. *Delik-delik Khusus*. Bandung : Tarsito.

Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Surabaya : Prenada Media.

R. Abdussalam. 2006. *Forensik*. Jakarta : Restu Agung.

### Perundang-undangan :

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Keempat
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik

Tempat Kejadian Perkara Dan  
Laboratoris Kriminalistik Barang  
Bukti Kepada Laboratorium Forensik  
Kepolisian Negara Republik  
Indonesia

**Jurnal :**

B.M. Kapuur. 2006. *Drug Testing Methods and Clinical Interpretations of Test Results*. Canada : Addiction Research Foundation.

Calvina Fay. 2010. *Drug Testing in The Workplace*. United States : The Journal of Global Drugs Policy and Prattice.

Edward J. Cone. 1998. *In Vivo Adulteration : Excess Fluid Investigation Causes False-Negative Marijuana and Cocaine Urine Test Results*. Maryland : Addiction Research Centre, Intramural Research Program, National Institute on Drugs Abuse, National Institutes of Health.

I Made Agus Gelgel Wirasuta. 2010. *Pengantar Menuju Ilmu Forensik*. Denpasar: Universitas Udayana.

Nasir Yusuf. 2009. *Kekuatan Pembuktian Hasil Laboratorium Forensik sebagai Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika*. Palembang : Pranata Hukum Volume 4 Nomor 2.